



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 September 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran 2. Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPT.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda “Pembahasan RKA K/L Tahun 2021, Isu-Isu Aktual Dan Solusinya”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar Rp92.817.590.291.000,- (*Sembilan Puluh Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yakni naik Rp30.793.320.713.000,- (*Tiga Puluh Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) atau sekitar 49,65 persen dari Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar Rp62.024.269.578.000,- (*Enam Puluh Dua Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Rincian Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	SATUAN UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat Jenderal	2.159.314.886.000
2	Inspektoral Jenderal	43.408.503.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	456.207.360.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.517.485.787.000
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.993.505.300.000
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin (FM)	57.256.152.505.000
7	Badiklit Pensos	391.515.950.000
TOTAL		92.817.590.291.000

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap RKA K/L Kementerian Sosial RI Tahun 2021 dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI.

2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyerapan anggaran Bansos Tunai Bagi KPM Sembako/ BPNT Non PKH yang telah terserap 100 persen penyalurannya sebesar Rp4.506.000.000.000 (*Empat Triliun Lima Ratus Enam Miliar Rupiah*) kepada 9 juta Kepala Keluarga (KK).
3. Komisi VIII DPR RI memahami rencana Kementerian Sosial RI melakukan optimalisasi anggaran tahun 2020 yang bersumber dari pengurangan target program Kartu Sembako dari 18,8 Juta KPM menjadi 18,5 Juta KPM dengan efisiensi dana sebesar Rp720 Miliar yang akan digunakan Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp276 Miliar, Ditjen Linjamsos Rp230 Miliar, Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp50 Miliar, Sekretariat Jenderal Rp114 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp10 Miliar dan Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp50 Miliar.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial RI agar dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2021 memperhatikan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dirasionalisasi karena jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 pada tahun 2021 tidak sebanyak tahun 2020.
 - b. KPM Program Bansos harus sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - c. Target program Kartu Sembako disarankan agar dapat diturunkan lagi dari 18,8 Juta KPM menjadi 18,3 Juta KPM.
 - d. Mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat Covid-19 yang

diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, Spt.